

BAB IV

TOTAL DIPLOMASI SEBAGAI UPAYA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KRISIS DIPLOMATIK QATAR TAHUN 2017

Dalam bab pendahuluan, penulis sudah memaparkan tentang hubungan kerjasama antara kedua Indonesia dan Qatar di berbagai bidang. Tetapi setelah adanya krisis diplomatik yang terjadi di Qatar pada 2017 silam, kekhawatiran Indonesia terhadap hubungan kerjasama yang semakin meningkat ini akan terkena dampak dari adanya krisis diplomatik tersebut. Untuk itu, Indonesia sudah mengambil beberapa sikap dan kebijakan untuk menghadapi krisis ini dengan tujuan agar dampak buruk/negatif bisa dapat teratasi dan dampak positifnya bisa dapat dipertahankan/ditingkatkan.

Adapun upaya Indonesia dalam penyelesaian krisis diplomatik Qatar ini, pemerintah menggunakan total diplomasi yang melibatkan berbagai stakeholder dalam penyelesaian krisis diplomatik Qatar ini. Artinya, upaya penyelesaian ini tidak hanya ditanggapi atau dilakukan oleh aktor negara saja tetapi juga melibatkan aktor bukan negara. Keterlibatan *non state actor* ini dapat dilihat dari adanya peran dari ketua dewan pertimbangan MUI yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyelesaikan krisis diplomatik Qatar. Keterlibatan MUI dalam penyelesaian krisis ini tentu dilatarbelakangi oleh adanya hubungan kerjasama pendidikan dan keagamaan antara Indonesia dan Qatar yang sudah terjalin lama.

A. Aktor Negara yang Terlibat Dalam Penyelesaian krisis Diplomatik Qatar

1. Presiden dan Wakil Presiden

Dari pemerintah khususnya Presiden Jokowi mengupayakan agar Indonesia mengambil peran solutif dalam menghadapi krisis diplomatik Qatar. Beliau mengungkapkan niat tekadnya agar Indonesia ikut dalam upaya penyelesaian krisis diplomatik. Semenjak adanya keputusan pada 5 Juni 2017 silam, Jokowi melakukan komunikasi dengan pemerintah-pemerintah yang terlibat untuk mengetahui penyebab krisis

yang sebenarnya. Presiden Jokowi sudah berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al-Tsani, dan Raja Uni Emirat Arab Syekh Mohammed bin Rasyid Al Maktoum untuk membahas penyelesaian krisis. (Waluyo, Indonesia Siap Ambil Peran Solutif Krisis Qatar, 2017)

Adapun Jusuf Kalla sebagai wakil presiden Indonesia dalam menyikapi krisis diplomatik Qatar ini menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara manapun dalam menyikapi krisis akibat pemutusan hubungan diplomatik Qatar oleh sejumlah negara Arab lain di Timur Tengah. Menurut Jusuf Kalla salah satu alasan Indonesia tak berpihak adalah karena pemerintah masih mempelajari polemik yang terjadi di sana. Menurut Jusuf Kalla, Kementerian Luar Negeri Indonesia masih mempelajari seluruh detail masalah di Qatar. Hingga saat ini pun Jusuf Kalla menyampaikan bahwa, laporan secara berkala sudah diberikan untuk melihat apa saja dampak yang akan diterima baik sekarang atau nanti.

Pria nomor dua di Indonesia itu menambahkan duta besar Indonesia yang berdomisili di Timur Tengah diminta aktif untuk melihat segala perkembangan yang terjadi. Namun secara pasti, Jusuf Kalla berharap kejadian di sana bisa diselesaikan dengan damai. Bahkan Jusuf Kalla menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi mediator dalam penyelesaian krisis diplomatik Qatar, dan peran mediator ini akan diambil oleh Indonesia apabila diminta dan didorong oleh pemerintah-pemerintah negara lain yang juga ikut berupaya dalam penyelesaian krisis diplomatik Qatar. (Pratama, 2017)

2. *Kementerian Luar Negeri dan Dubes RI di Doha*

Selain Presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia sudah mengambil beberapa langkah untuk membuktikan bahwa Indonesia juga ikut dalam penyelesaian krisis ini. Sejak krisis Qatar mengemuka, Menlu Retno telah melakukan upaya komunikasi dengan sejumlah Menlu dari negara kunci, seperti Arab Saudi, PEA dan Qatar yang menjadi pihak dalam konflik,

maupun dengan Menlu lainnya, antara lain Uni Eropa, Jerman, Turki, Kuwait, dan Iran yang dipandang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian konflik. Secara khusus Menlu menginformasikan dua kali komunikasinya dengan Menlu Kuwait, karena Kuwait dipandang dapat berperan sebagai penengah seperti saat terjadi krisis politik serupa pada tahun 2014.

Pada 15 Juni 2017 silam, Retno Marsudi, menerima utusan khusus presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), Abdul Rahman bin Mohammed Al-Owais yang saat ini menjabat Menteri Kesehatan dan Pencegahan PEA di Gedung Pancasila. Dalam pembicaraan keduanya, Utusan Khusus PEA menyampaikan apresiasi atas peran aktif Indonesia untuk membantu penyelesaian damai krisis di Kawasan Teluk. Dalam hal ini, Indonesia dinilai sebagai negara yang bersahabat kepada semua pihak, dan terus berupaya menciptakan kondisi kondusif bagi berlangsungnya dialog. Menlu RI menyampaikan bahwa Indonesia mengikuti secara dekat dan prihatin dengan perkembangan situasi di Timur Tengah saat ini. Kedua Menteri sepakat bahwa upaya mediasi yang tengah dilakukan oleh Kuwait adalah langkah terbaik. Indonesia dan PEA mendukung langkah mediasi yang digagas oleh Kuwait ini.

Menlu Retno menekankan pula pentingnya semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan langkah-langkah yang akan memperburuk situasi. Menlu Retno juga berharap semua pihak selalu mengedepankan dialog dan rekonsiliasi dengan menjajaki semua jalan damai yang memungkinkan. Tidak hanya itu, Menlu Retno Marsudi mengharapkan setiap pihak dapat menjadi bagian dari solusi, karena jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, ramifikasinya akan sangat luas, baik bagi dunia Islam, maupun keamanan global.

Retno menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi. Hal ini disambut baik oleh para menteri. Kunjungan ini dinilai sebagai respons Timur Tengah atas kesiapan Indonesia untuk membantu krisis yang tengah terjadi di sana. Selain itu, Menlu Retno terus berkoordinasi dengan

Dubes Indonesia untuk Doha, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhamad Basri Sidehabi, untuk memastikan keselamatan dan keamanan para WNI di Doha yang saat ini berjumlah sekitar 29 ribu. Mengingat banyaknya isu-isu global yang telah terjadi khususnya di Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri membangun sistem penanganan kasus WNI di luar negeri melalui penguatan strategi perlindungan, antara lain dengan penguatan sistem kelembagaan, penguatan diplomasi perlindungan dan *grand design* penyelesaian kasus. Penguatan koordinasi dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan terkait merupakan suatu keniscayaan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI mendorong penetapan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik secara menyeluruh terutama di Timur Tengah serta pembenahan pada sektor-sektor lainnya telah mendapat dukungan Kemenaker dan BNP2TKI dan diharapkan dapat ditetapkan dalam waktu dekat. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017)

Adapun dari pihak Kedutaan Besar Indonesia di Qatar mengimbau Warga Negara Indonesia (WNI) tetap tenang namun waspada serta terus mengikuti perkembangan situasi keamanan melalui berbagai sarana, terkait pemutusan hubungan diplomatik negara-negara Arab dengan Qatar. Duta Besar RI untuk Qatar Marsekal Madya TNI (Purn), Muhamad Basri Sidehabi saat ini tengah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan keamanan dan keselamatan WNI di Qatar. Pasca terjadinya krisis diplomatik, dubes RI melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di kompleks Al-Khor Community (AKC). Dalam pertemuan itu, dubes RI menyampaikan kepada WNI di Qatar bahwa tidak perlu adanya langkah-langkah yang berlebihan dalam menyikapi krisis Qatar, beliau melanjutkan bahwa situasi dan kondisi kemananan di Qatar masih aman dan terkendali. Berdasarkan informasi International Organisation for Migration (IOM), jumlah WNI di Qatar pada tahun 2015 sekitar 43 ribu jiwa. Mereka tersebar di seluruh Qatar, terutama

di Al Khor, Dukhan, Umm Said, Al Shamal, Doha dan daerah di sekitarnya. Kunjungan ke Al Khor tersebut merupakan upaya KBRI untuk menunjukkan kepada WNI di Qatar bahwa kondisi politik dan keamanan berjalan normal seperti biasanya. (Situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017)

Dubes RI yang didampingi Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Doha, Endang Kuswaya dan Pelaksana Fungsi Politik, Boy Dharmawan juga melakukan pemantauan langsung di berbagai tempat, termasuk di jalan-jalan dan kondisi pusat pebelanjaan serta keramaian lainnya. Walaupun menurut KBRI Doha tidak terdapat tanda-tanda eskalasi politik dan keamanan, namun menurut Basri ada peningkatan keamanan khususnya kawasan yang dianggap penting seperti pusat pemerintahan, tempat-tempat ibadah, bandara, stasiun, terminal bis, dan fasilitas publik yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat. KBRI juga telah mempersiapkan langkah guna mengantisipasi kondisi di lapangan.

Selain itu, Basri juga menyampaikan bahwa Indonesia mengharapkan semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah ini. Indonesia juga menekankan kembali agar semua negara yang tengah bertikai bisa menghormati prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing masing negara dan tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Indonesia mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah dalam memerangi terorisme dan berkontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan dan global. (Kertopati, Qatar Dikucilkan Negara Arab, Dubes RI Sebut WNI Aman, 2017)

3. Berbagai Departemen Kementerian dan Wakil Ketua MPR

Dalam upaya penyelesaian krisis diplomatik Qatar ini, Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita mengatakan akan memantau dampak krisis politik yang terjadi di Qatar dan sejumlah negara Arab lain. Kementerian, kata dia, akan terus memonitor dan memantau perkembangan permasalahan di Timur Tengah untuk memastikan dampaknya

bagi Indonesia. Enggar menilai kisruh diplomatik antara Qatar dan sejumlah negara Arab belum terasa dampak negatifnya bagi perekonomian Indonesia. Penilaian ini disampaikan oleh beliau saat berada di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta. Selanjutnya ia mengatakan bahwa peluang perdagangan sejumlah komoditas Indonesia ke Qatar belum terlalu mendapatkan dampak yang signifikan terhadap Indonesia, Enggar menilai sejauh ini masih tidak ada gangguan, tapi kedepannya Enggar belum bisa memastikan dan menjamin kondisi perekonomian Indonesia selama persetujuan diplomatik ini belum menemui titik temu. Untuk itu, menteri perdagangan selalu memonitor dan terus memantau perkembangan dari krisis diplomatik yang terjadi di Qatar. (Priyanto, 2017)

Adapun dari menteri agama Indonesia menyatakan akan memantau langsung pelaksanaan haji 2017 di Jeddah. Hal ini tentu dilakukan untuk menghindari adanya dampak buruk yang akan terjadi pada jamaah haji Indonesia mengingat adanya persetujuan antara Qatar dan negara-negara teluk lainnya termasuk Arab Saudi. Di Arab Saudi, sebagai Amirul Haj, Lukman akan memimpin langsung penyelenggaraan ibadah haji jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Menteri Lukman mengatakan ada tiga misi yang ia jalankan sebagai Amirul Haj. Pertama, mengkoordinasi langsung kerja sama antarberbagai institusi dalam kepanitiaan ibadah haji Indonesia. Menurut Lukman, penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional yang melibatkan banyak pihak selain Kementerian Agama. Pihak-pihak terkait itu beberapa di antaranya adalah Kementerian Kesehatan, TNI, dan Polri. Kedua, memberikan konsultasi atau saran ketika muncul persoalan-persoalan luar biasa di lapangan. Menurut Menag, dalam setiap penyelenggaraan haji, sering muncul persoalan-persoalan aktual yang perlu mendapatkan bimbingan dan masukan dari Amirul Haj. Persoalan itu bisa terkait masalah keagamaan, seperti manasik haji, atau hal teknis pengorganisasian dalam penyelenggaraan haji. Dan, misi ketiga adalah melakukan kontrol terhadap para

petugas agar dapat bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (Kardi, 2017)

Krisis diplomatik Qatar ini bisa berdampak pada jamaah haji Indonesia karena adanya blokade penerbangan Qatar Airways untuk melewati Jeddah/Arab Saudi. Untuk itu, menteri luar negeri melakukan komunikasi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Agama untuk berkoordinasi mencari solusi bagi jamaah umroh kita yang ada di Arab Saudi. Begitupun dengan yang akan berangkat juga dilakukan pengalihan-pengalihan kepada maskapai lainnya. Sementara di Indonesia, kementerian perhubungan memindahkan jamaah umrah yang menggunakan Qatar Airways ke maskapai lain.

Sedangkan dari kementerian ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menghimbau kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Qatar agar dapat berkomunikasi secara intensif dan selalu mengakses informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Doha, Qatar. Para TKI juga diminta tetap tenang dan waspada selama di sana. Imbauan tersebut berkaitan dengan krisis politik di Qatar yang terjadi. Krisis tersebut merupakan dampak dari keputusan beberapa negara di Timur Tengah untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Qatar. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan RI, R Soes Hindharno mengatakan bahwa Komunikasi dengan Atase Ketenagakerjaan di KBRI Doha harus lebih intensif. Sehingga jika ada kebijakan dari pemerintah RI terkait perlindungan TKI di Qatar dapat cepat tersosialisasi.

Menindaklanjuti krisis tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker RI juga mengeluarkan surat edaran untuk perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) agar lebih berhati-hati dan mempertimbangkan faktor keamanan dan perlindungan TKI sebelum menempatkan mereka. PPTKIS juga diminta membantu mempermudah keluarga TKI yang membutuhkan informasi terkait keberadaan TKI di Timur Tengah. Selain itu, PPTKIS pun diimbau untuk berkoordinasi dengan agensi

penempatan TKI di Qatar dan Atase Ketenagakerjaan di KBRI Doha guna memantau keberadaan para TKI. Soes Hindharno mengatakan sejauh ini keberadaan TKI di Qatar masih aman sehingga belum mengharuskan pemerintah melakukan evakuasi dan pemulangan TKI. Namun, kata Soes, pihaknya sudah memerintahkan Atase Ketenagakerjaan RI di Doha Qatar untuk terus memantau situasi yang terjadi Qatar. (Kompas, 2017)

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap krisis diplomatik yang melanda Qatar, karena negara-negara yang berseteru tersebut adalah anggota OKI yang dikhawatirkan akan memecah persatuan dan kekuatan Islam. Terkait dengan peran Indonesia dalam krisis tersebut, Hidayat mendukung pernyataan Menteri Luar Negeri RI yang menyatakan akan memediasi dan berkontribusi menghadirkan solusi agar kondisi yang terbaik kembali di kawasan Teluk, juga di kawasan negara-negara OKI lainnya. Menurut Hidayat, Indonesia semestinya tidak hanya menawarkan diri, tapi langsung berperan aktif seperti yang dilakukan Turki. Mengapa Indonesia sangat *concern* akan hal tersebut, karena dari sisi Indonesia, ini adalah kewajiban yang sudah disepakati dan terpatri oleh para *founding fathers* dan *founding mothers* dulu dalam Pembukaan UUD. Pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu jelas ditegaskan pada alinea terakhir bahwa Indonesia terlibat menjaga perdamaian dunia. Menurut Hidayat, ini adalah satu hal penting yang harus betul-betul dilaksanakan. Terlebih Indonesia berada pada pihak yang diterima kedua belah pihak, baik oleh Qatar maupun oleh pihak Arab Saudi dan negara Arab lainnya. Hidayat pun menambahkan bahwa Indonesia harus melihat krisis ini sebagai kesempatan yang sangat bagus untuk tampil dan membuktikan kepemimpinannya di tingkat dunia untuk menghadirkan solusi. Dalam sejarah, Indonesia memiliki *track record* yang baik berkiprah dalam penyelesaian masalah di Asia Tenggara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia harus memaksimalkan perannya menjadi fasilitator islah agar permasalahan di Timur Tengah, dalam konteks ini di negara-

negara Teluk, segera selesai dan menghadirkan suasana damai di Timur Tengah. (Ratya, 2017)

B. Aktor *Non State* (Bukan Negara) yang Terlibat Dalam Penyelesaian Krisis Diplomatik Qatar

Melihat perkembangan atas krisis perdamaian di negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Arab Saudi yang memutuskan hubungan dengan Qatar, Dewan Pertimbangan MUI menggelar pertemuan dengan puluhan perwakilan tokoh Ormas Islam di Kantor MUI, Jakarta Pusat pada 7 Juni 2017. Rapat tersebut dipimpin Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin. Dalam pertemuan itu, Din meminta saran dan pendapat dari tokoh ormas Islam yang hadir. Saran-saran tersebut ditampung untuk menyerukan pesan bersama terkait ketegangan negara Islam yang bisa memicu peperangan tersebut. Menurut Din, seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan akan ada serangan untuk saling melukai antara negara-negara tersebut. Prof. Din menilai, bila konflik ini dibiarkan, dikhawatirkan akan ada perseteruan lanjutan yang bahkan bisa berdampak pada perang saudara antar sesama umat Islam.

Untuk itu, Prof. Din, Wantim MUI akan mengirimkan surat kepada negara-negara Islam yang sedang berkonflik agar berdamai. Pesan tersebut berjudul “Pesan Ramadan dari Jakarta”. Surat tersebut berisi: (Azhar, 2017)

1. Menyatakan keprihatinan mendalam dan kekhawatiran ketegangan yang terjadi di Timur Tengah menciptakan al-Fitnah al-Kubra Modern, yang hanya akan menghancurkan dunia dan peradaban Islam.
2. Mendesak semua pihak untuk mengendalikan diri terutama pada bulan Ramadan yang beresensi ‘Imsak’, terutama imsak ‘an al-harbi wa al-qital wa tamassuk bi al-jihad al-akbar, karena bisa membawa dampak negatif bagi ibadah umrah dan haji.
3. Mendesak masing-masing pihak bersedia menyelesaikan masalah yang ada berdasarkan prinsip musyawarah dan islah dzat al-bain dalam semangat Ukhuwah Islamiyah.

4. Menyerukan rakyat dan ulama di masing-masing negara untuk menolak peperangan, mendorong tercapainya perdamaian (islah), dan meredakan krisis politik di kawasan negara masing-masing dengan segala cara strategis dan optimal.
5. Mendukung pemerintah Indonesia mengambil organisme dengan segera dan mendesak sidang darurat Oki untuk menghindari perpecahan dan peperangan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip piagam OKI;
 - a. Pasal 1 ayat 1: Memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas sesama anggota OKI.
 - b. Pasal 1 ayat 6: Mengembangkan hubungan antara negara anggota berdasarkan prinsip keadilan dan saling menghormati.
 - c. Pasal 2 ayat 3: Semua anggota OKI harus menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak menggunakan ancaman dan cara kekerasan.
6. Negara-negara Islam anggota OKI mewaspadaikan dan menolak upaya intrik politik proxy war yang bercirikan nafsu politik saling curiga, saling menyudutkan dan menyalahkan, dan saling kita terhadap segala kebijakan politik masing-masing negara, baik di kawasan Timur Tengah maupun kebijakan hubungan dengan negara-negara lain.
7. Mengingatkan kepada dunia internasional untuk tidak memperkeruh suasana dengan isu-isu diplomatik yang antagonistik, hegemonik, tiranik, dan politik pecah belah dalam pentas hubungan internasional. Termasuk ke kawasan negara-negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim.
8. Menghimbau kepada umat islam sedunia agar melakukan doa (Qunut Nazilah) dalam bulan Ramadan ini untuk perdamaian dan keamanan dunia.

Sedangkan pada 8 juni 2017, MUI mengeluarkan 6 seruan untuk perdamaian di Qatar. Seruan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, diantara butir-

butir seruan tersebut adalah sebagai berikut:(Admin MUI, 2017)

1. MUI mengharapkan kepada semua negara yang sedang bertikai yaitu Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa untuk menahan diri, tidak memberikan komentar yang dapat memanaskan situasi dan lebih mengedepankan mekanisme dialog, negosiasi dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah.
2. MUI mengimbau kepada semua negara untuk menghormati prinsip-prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing-masing negar, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain dan turut serta menjaga perdamaian dunia.
3. MUI mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk berperan menjadi mediator dan negosiator di antara negara yang sedang berkonflik. Memprakarsai untuk dilaksanakan dialog damai dengan semua negara untuk mencari solusi yang terhormat dan bermartabat.
4. MUI mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah dalam memerangi terorisme dan berkontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan serta keamanan global.
5. MUI meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi perkembangan situasi keamanan serta menyiapkan langkah-langkah darurat untuk pengamanan bagi WNI yang berada di Qatar, Arab Saudi dan semua negara yang sedang berkonflik.
6. MUI mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan otoritas negara setempat guna memastikan keamanan dan keselamatan seluruh WNI di Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa.

Setelah mengeluarkan seruan, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bertempat di rumah

dinas Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada 12 Juni 2017. Din Syamsuddin menyampaikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan rekonsiliasi atau “islah” kepada para negara-negara Arab ini. Indonesia pun diminta untuk mendesak OKI untuk melakukan sidang darurat guna mencegah perpecahan yang mungkin terjadi di wilayah Timur Tengah ini jika tidak ada tindakan yang berarti untuk penyelesaian konfliknya. Menurut Din peristiwa konflik ini bukanlah peristiwa kecil yang bisa dianggap remeh, krisis itu akan membawa dampak berantai terhadap negara-negara Islam lainnya, termasuk Indonesia. Din mengatakan Indonesia dapat menampilkan peran sebagai penengah yang baik. Indonesia menurutnya harus segera mengirim utusan yang dikenal baik di Timur Tengah.

Walaupun, Din Syamsuddin tidak mengetahui mekanismenya, ia menyarankan kepada Indonesia untuk mengambil prakarsa seperti (melangsungkan pertemuan) bukan di kawasan Timur Tengah, tetapi di Jakarta atau di tempat lain. MUI juga mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan pertemuan sidang darurat OKI atas undangan Indonesia, atau bisa juga dengan menggelar sidang darurat negara-negara Islam atau tokoh-tokoh Islam, yang tak hanya melibatkan pemimpin pemerintahan tetapi pemimpin umat atau masyarakat. Din juga menilai Indonesia harus memanfaatkan organisasi OKI yang mayoritas berisi negara Islam di kawasan. Meski meminta bantuan OKI melalui sidang darurat akan sulit dilakukan karena markas besarnya ada di Jeddah dan sekjennya berasal dari Arab Saudi. (A15, 2017)